

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Sektor Pajak Jadi Bidikan

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galamedia/Hal.2

Edisi : Rabu, 18 April 2018

BPPD Upayakan PAD Terus Meningkatkan

Sektor Pajak Jadi Bidikan

WASTUKANCANA, (GM).-

Pendapatan daerah merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Tanpa upaya mengoptimalkan raih pendapatan, pembangunan kota bisa terkendala. Melalui Badan Pengendalian Pendapatan Daerah (BPPD), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya agar pendapatan asli daerah (PAD) terus meningkat.

Itulah yang dilakukan Kepala BPPD Kota Bandung, Ema Sumarna yang tengah mengejar target pendapatan daerah dari sektor pajak dan memberikan pelayanan pajak daerah kepada warga Kota Bandung. Hal itu dikatakan Ema dalam Bandung Menjawab di Media Lounge Balai Kota Bandung, Jln. Wastukencana Bandung, Selasa (17/4).

Ema mengungkapkan sejumlah langkah yang dilakukan agar target-target kinerjanya bisa tercapai. Salah satu program kebanggaannya adalah sensus PBB (pajak bumi dan bangunan) yang dilaksanakan pada tahun 2017.

"Dari sensus itu didapat data riil, data yang paling valid sebagai dasar penarikan pajak. Setelah sensus, kami jadi terbuka peluang pendapatan sebesar kurang lebih Rp 72 miliar dari perubahan tambahan objek pajak bumi dan bangunan," jelas Ema.

Ema berharap, penambahan potensi pajak itu bisa membantunya memenuhi target pendapatan dari sektor PBB sebesar Rp 700,5 miliar yang meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 578 miliar.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menambah tapping box yang akan dipasang di berbagai lokasi self-assessment tax. Tahun ini, pihaknya telah menganggarkan Rp 3 miliar untuk pengadaan 375 tambahan tapping box.

Tapping box adalah alat perekaman transaksi yang dipasang di mesin-mesin kasir. Alat tersebut berfungsi untuk mencatat setiap transaksi wajib pajak sebagai dasar perhitungan pajak. "Tapping box itu mencegah kebocoran tran-

saksi, jadi semuanya pasti tercatat sehingga pengambilan pajak bisa optimal dari para wajib pajak. Tahun 2016, kita sudah menyebarkan 575 ke hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain," jelasnya.

Ya memastikan, tapping box itu efektif untuk memaksimalkan perolehan pajak. "Kita hanya modal Rp 2,75 miliar, uang yang didapat Rp 24,5 miliar. Itu success story kami," imbuhnya.

Regulasi

Tak hanya itu, ia juga tengah berjuang menerbitkan regulasi tentang mekanisme perhitungan pajak reklame. Semula, hanya reklame yang berizin yang bisa ditarik pajaknya. Berdasarkan data 2017, ada 5637 reklame berizin di Kota Bandung. Sementara yang tak berizin berjumlah 12.600. Jika regulasi baru itu telah terbit, setiap reklame yang terpasang bisa ditarik pajaknya.

"Karena sayang sekali, reklame itu sudah dipasang, terkadang menghalangi pemandangan, dan sudah terjadi transaksi bisnis, tetapi tidak bisa ditarik pajaknya. Mereka sudah tidak berizin, tidak bayar pajak pula," tegasnya.

(B.95)**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Jalan Soekarno - Hatta No. 586 Telp. (022) 7562056 BANDUNG						
PENGUMUMAN (TENTANG SERTIPKAT HILANG) Nomor : 2428/7.32.73/Peng/2017.						
Untuk mendapatkan Sertipkat baru sebagai pengganti Sertipkat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa Sertipkat di bawah ini dinyatakan telah hilang dan dimohon Sertipkat pengganti:						
Nama/Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah Jenis dan Nomor Hak	NIB	Terdahar Atas Nama	a. Tanggal Pembukuan b. No. Blanko	Letak Tanah a. Blok b. Kelurahan c. Kecamatan	Keterangan a. Surat Keterangan Hilang b. Pernyataan di bawah Sumpah
Hj. Yuyun Sili Nursiyah	Hak Milik No : 2075/Sertijadi Luss : 142 m2	10.15.22.04 01369	Nyonya Yuyun Sili Nursiyah	a. 29-12-1998 b. -	a. Jl. Sertijadi Kav. No. 27 b. Sertijadi c. Sukasari	a. B/SKTKL/47493/V/2016/SPKPT Poinstabas Bdg b. Tgl. 27-06-2016 c. Tgl. 09-02-2017
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini dimuat dalam Surat Kabar, bagi mereka atau siapapun yang merasa berhak berurusan dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung, Telp. (022) 7562055 - 7566165 dengan disertai alasan hukum dan bukti yang kuat.						
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipkat tersebut di atas, maka Sertipkat pengganti akan diterbitkan dan berlaku menurut hukum dan selanjutnya Sertipkat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.						
Bandung, 29-12-2017. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, Ttd. ELIJAS B. TAJAHAJADI NIP. 19670414 199310 1 001						